

**PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KOMITMEN MANAJEMEN DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP
PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada Pemerintahan Kota Bukittinggi)**

Oleh :

Mutia Yesnita

Pembimbing : Desmiyawati dan Pipin Kurnia

Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : mutiayesnita@yahoo.com

*The Effect Of External Pressure, Commitment Of Management And Government
Internal Control System To The Application Management Financial
Transparency Reporting
(Empirical studies on the Government of Bukittinggi City)*

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the influence of the external pressure, commitment of management and government internal control system to the application management financial transparency reporting. The population in this study were employees who worked in the Bukittinggi city (27 government agencies). The sampling method used in this study is purposive sampling method. The hypotheses then tested by using SPSS 17. The results of this study indicated that the external pressure, management commitment, internal control system significantly affect the transparency of financial reporting. The magnitude of the effect (R^2) of the external pressure, commitment of management and government internal control system to the application management financial transparency reporting was 33,3 %. While the remaining 66,7% is influenced by other variables outside the model that has not been included in this study.

Keyword: transparency of financial reporting, external pressure, management commitment and internal control system

PENDAHULUAN

Respon rakyat yang sangat tinggi akan permintaan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) mencerminkan bahwa otonomi daerah di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Untuk itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat,

membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk sebagian daerah, otonomi daerah tentu disambut baik oleh sejumlah kekayaan alam yang melimpah, akan tetapi bagi daerah dengan potensi sumber daya alam terbatas tentu otonomi menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat.

Untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), didalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tentu dibantu oleh tenaga akuntan yang berkualitas, serta harus dilengkapi dengan nilai transparansi yang tinggi dalam penyusunan, pengelolaan hingga evaluasi terhadap implementasi laporan keuangan.

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik, ekonomi, pemerintah dan keputusannya. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dimana informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2004).

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong agar dipatuhinya kebijaksanaan manajemen (Mulyadi, 2002).

Menurut Robbins dan Timothy (2008) komitmen menunjukkan janji yang tertanam didalam diri masing masing individu yang terlibat didalam sebuah organisasi. Komitmen menunjukkan usaha nyata yang dilakukan oleh pihak yang terlibat didalam manajemen untuk mencapai sasaran yang ditargetkan perusahaan, salah satunya komitmen yang dijanjikan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelaporan keuangan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Untuk mempertahankan komitmen dalam menciptakan transparansi pelaporan keuangan tentu sangat sulit dan merupakan tantangan, dan upaya untuk meningkatkan citra pemerintah daerah ditengah masyarakat.

Selain itu pengendalian intern dalam pelaksanaannya juga harus diuji keefektifitasannya. Penentuan apakah pengendalian telah diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat serta apakah pelaksana sudah memiliki kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pengendalian tersebut secara efektif merupakan tujuan dari dilaksanakannya pengujian pengendalian intern (A.Arens, 2008). Seperti yang kita ketahui, jika pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif serta peraturan perundang-undangan dijalankan maka pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, asset milik negara tetap aman dan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Di Indonesia, transparansi akan pengelolaan keuangan masih sangat minimal sekali karena sebagian besar pemerintah daerah masih lebih menitikberatkan segala pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada rakyat luas. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah yang terjadi saat ini seharusnya lebih bersifat horisontal, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap DPRD dan pada rakyat luas (*dual horizontal accountability*). Akan tetapi, dalam praktiknya tidak terjadi keseimbangan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana, sehingga hak rakyat untuk mengetahui (transparansi) mengenai pengelolaan dana tidak terpenuhi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Asmidawati (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya :

Yang pertama, penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada pemerintah daerah Provinsi Riau, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Perbedaan lokasi ini juga dapat memperluas pengetahuan penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Yang kedua, penelitian sebelumnya melakukan penelitian dengan variable internal tekanan eksternal dan komitmen manajemen, sedangkan penelitian ini menambah variabel sistem pengendalian internal

pemerintah (Diana Sari,2013) sebagai perluasan dari penelitian.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi? 2. Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi? 3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai: 1. Pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi. 2. Pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi. 3. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi.

TELAAH PUSTAKA

Transparansi Pelaporan Keuangan

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimengerti. Menurut Sedarmayanti (2007). Transparansi adalah tata

kelola pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja. Keterbukaan dan transparansi juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan kegiatan di Pemerintah.

Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya (DiMaggio dalam Ridha dan Basuki, 2012). DiMaggio (1983) juga menyatakan bahwa tekanan eksternal berasal dari pengaruh politik dan kebutuhan untuk legitimasi.

Tekanan eksternal yang sangat berpengaruh adalah tekanan yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem (Ashworth

dalam Ridha dan Basuki, 2012). Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik.

Di sisi lain, kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi (*legitimate coercion*, scott 1987), sehingga hanya menekankan aspek-aspek positif (Hess, 2007) agar organisasi terlihat baik oleh pihak-pihak di luar organisasi.

Perubahan organisasi yang didasari kekuatan koersif akan menyebabkan organisasi lebih mempertimbangkan pengaruh politik dari pada teknis (Ashworth dalam Ridha dan Basuki, 2012). Perubahan organisasi yang lebih dipengaruhi politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, khususnya terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan akan hanya bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi.

Komitmen Manajemen

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Komitmen dapat juga diartikan sebagai penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut (Soekidjan, 2009).

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Richard M. Steers (Sri Kuntjoro, 2002) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Steers berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi dimana pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian intern yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut (Baihaqi, 2004). Oleh karena itu sebelum auditor melakukan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memahami terlebih dahulu pengendalian intern.

Pengendalian intern (*internal control*) sebagai suatu sarana yang diciptakan oleh dan untuk

kepentingan organisasi sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh *Committee on Auditing Procedure* dari *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* (Sawyer dalam Diana 2013) sebagai berikut :

“Internal Control comprises the plan of organization on and all of coordinate methods and measures adopted within a business to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational efficiency, and encourage to prescribed managerial policies.”

Unsur SPIP yang diadaptasi dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Penilaian risiko

b. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam, terdiri atas kegiatan identifikasi risiko; dan analisis risiko.

c. Kegiatan pengendalian

Membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi, terdiri atas:

1. *Reviu* atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2. *Pembinaan* sumber daya manusia;

3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. Pengendalian fisik atas aset;
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. Pemisahan fungsi;
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu, sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

e. Pemantauan pengendalian

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah satuan kerja

perangkat daerah Kota Bukittinggi. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei dan Juni 2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah Kota Bukittinggi, yang berjumlah 24 dinas ditambah dengan seluruh Kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi berjumlah 3 Kecamatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sample nonprobabilitas dengan purposive sampling (karakter tertentu) yaitu dengan menyebarkan kuesioner pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di kota Bukittinggi

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data subjek. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Bukittinggi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh langsung dari responden yang menjadi anggota sampel. Pengumpulan data diperoleh dengan cara memberikan kuesioner (mail questioner), yang berisi daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada responden

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Transparansi Pelaporan Keuangan

Transparansi pelaporan keuangan, mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut bahwa organisasi untuk menjadi lebih transparan dalam praktiknya, tidak hanya pada jumlah yang dirilis, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasional.

Transparansi pelaporan keuangan dalam penelitian ini adalah terkait semua upaya SKPD yang secara sengaja melaporkan semua informasi keuangan yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif, akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab SKPD atas tindakan, kebijakan, dan praktik yang dilakukannya.

Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal dalam hal ini terkait dengan tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya. Frumkin dan Galaskiewicz (2004) menyatakan bahwa tekanan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintahan menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerepan suatu kebijakan maupun prosedur. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi. Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Komitmen Manajemen

Komitmen Manajemen(X2), Komitmen manajemen dalam hal ini terkait dengan integritas manajemen dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Paine (1994) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada sekedar inisiatif kepatuhan atas hukum maupun peraturan.

Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Manajemen seharusnya mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk sukses dalam jangka panjang. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui tindakan dan perilaku yang tepat.

Selain itu, manajemen secara pribadi juga terlibat untuk memastikan bahwa sistem manajemen SKPD yang dikembangkan dan diimplementasikan sudah berjalan. Sistem manajemen yang baik, dalam hal ini transparansi pelaporan keuangan dapat tercapai apabila SKPD memiliki staf yang andal dan kompeten dibidangnya, dibangunnya budaya etis secara komprehensif, dan lain-lain. Sistem manajemen yang baik tersebut akan berdampak pada terpenuhinya standar profesionalisme yang seharusnya ada pada SKPD-SKPD.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian Internal(X3), Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode-metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (Marshall dan Paul Jhon, 2004).

Pengukuran Variabel

Konstruk-konstruk dalam penelitian ini diukur menggunakan multi item variabel manifest. Seluruh konstruk masing-masing ukuran dinilai dengan skala ordinal 1 sampai 5. Skala ordinal digunakan untuk

mengukur respon subjek ke alternative jawaban, seluruh variabel diberikan lima alternatif jawaban.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan dalam kondisi sebenarnya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Astria, 2010). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran umum mengenai demografi responden dalam penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian (tekanan eksternal, komitmen manajemen, sistem pengendalian internal pemerintah dan transparansi pelaporan keuangan).

Uji Validitas

Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer *Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 17 for windows*. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom ($df = n - 2$) dengan $\alpha = 0,05$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53).

Uji Reliabilitas Data

Untuk mengukur reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,6 dianggap

buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,8 adalah baik (Ghozali, 2013). Jadi, apabila suatu variabel menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 maka variabel tersebut reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda untuk mengukur antara variabel independen (tekanan eksternal, komitmen manajemen dan sistem pengendalian) dengan variabel dependen (penerapan transparansi pelaporan keuangan), dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik.

Pengujian Hipotesis

Setelah mendapatkann model penelitian yang baik, maka dilakukan pengujian hipotesis terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian Hipotesis pertama tentang pengaruh antara Tekanan Eksternal (X_1) terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Y), hipotesis kedua tentang pengaruh Komitmen Manajemen (X_2) terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Y), hipotesis ketiga tentang Sistem Pengendalian Internal (X_3) terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Y) dan menggunakan koefisien regresi yang dapat dilihat dalam persamaan berikut :

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

Uji t

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji statistik t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dan untuk mengetahui

apakah variable bebas memiliki hubungan yang signifikan atau tidak. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013:98).

Koefisien Determinasi (uji R²)

Koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variable dependen sangat terbatas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat eselon IV dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bukittinggi. Semua SKPD (100%) menerima kuesioner yang diserahkan oleh penulis. Dan kuesioner yang kembali sebesar 88% atau sebanyak 71 kuesioner.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data dilakukan terhadap 71 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data. Data yang diolah merupakan hasil rata-rata jawaban responden untuk masing-masing variabel, yaitu tekanan eksternal, komitmen manajemen, sistem pengendalian

internal pemerintah dan transparansi laporan keuangan. Statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
TPK	71	7	25	21.13	2.635
TEL	71	13	24	19.18	2.079
KM	71	7	25	20.41	3.254
SPIP	71	26	80	64.68	7.006
Valid N (listwise)	71				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah responden (n) variabel (X1) sebanyak 71, nilai minimum adalah 13, nilai maximum adalah 24 dan nilai rata-rata (mean) adalah 19,18. (X2) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 71, nilai minimum adalah 7, nilai maximum adalah 25 dan nilai rata-rata (mean) adalah 20,41 (X3) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 71, nilai minimum adalah 26, nilai maximum adalah 80 dan nilai rata-rata 64,68 . (Y) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 71, nilai minimum adalah 7, nilai maximum adalah 25 dan nilai rata-rata (mean) adalah 21,13.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen tersebut dikatakan valid. R tabel dapat dilihat di tabel r

(*correlation pearson*) uji 1 sisi dan 2 sisi pada taraf signifikansi 0,05. R tabel untuk sampel sebanyak 71 adalah 0,234. Dari Tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Batasan nilai dalam uji ini adalah 0,6, jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka menunjukkan nilai yang kurang baik. Nilai reliabilitas dalam uji ini adalah pada kolom *Reliability Statistics (Cronbach's Alpha)* dan dikatakan reliabel apabila nilai koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,6.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa reliabilitas tekanan eksternal menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,725, reliabilitas komitmen manajemen menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,799, reliabilitas sistem pengendalian internal pemerintah menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,748, dan reliabilitas transparansi laporan keuangan menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,765. Jadi, diketahui nilai reliabilitas ke empat variabel berada diatas angka 0,6 yang artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipercaya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh pernyataan baik variabel independen (tekanan eksternal, komitmen manajemen dan sistem pengendalian internal pemerintah), maupun variabel dependen (transparansi pelaporan keuangan) dinyatakan

normal. Serta hasil uji multikolinieritas, heterokedastisitas, autokorelasi menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinieritas, heterokedastisitas, autokorelasi.

Uji Hipotesis dan Pembahasan

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen (tekanan eksternal, komitmen manajemen dan sistem pengendalian internal pemerintah) terhadap variabel dependen (transparansi laporan keuangan) secara parsial. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, maka diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 4.118 + 0,298 X_1 + 0,227 X_2 + 0,103 X_3 + e$$

- a. Konstanta (a) = 4,118 menunjukkan nilai konstan, mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu tekanan eksternal, komitmen manajemen dan sistem pengendalian internal pemerintah, diasumsikan nol (0) maka transparansi pelaporan keuangan (Y) adalah sebesar konstanta 4,118.
- b. Koefisien $X_1 = 0,298$, Artinya jika variabel tekanan eksternal ditingkatkan satu (1) satuan maka akan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan sebesar 4,118.
- c. Koefisien $X_2 = 0,227$, Artinya jika komitmen manajemen ditingkatkan satu (1) satuan maka, akan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan sebesar 4,118.
- d. Koefisien $X_3 = 0,103$, Artinya jika sistem pengendalian

internal pemerintah ditingkatkan satu (1) satuan maka akan meningkatkan variable transparansi pelaporan keuangan sebesar 4,118.

- e. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

Pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi laporan keuangan

Pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi laporan keuangan dijelaskan dalam bentuk pernyataan hipotesis pertama (H_1), sebagai berikut:

H_1 : tekanan eksternal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

Dengan demikian nilai t_{hitung} (2,240) > t_{tabel} (1,995) t_{hitung} dengan nilai signifikansi t sebesar (0,028) < (0,05), hal ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan dan H_1 diterima. Artinya, tekanan eksternal meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ridha dan Basuki (2012), Johannes (2013) dan Asmidawati (2013) yang menyatakan bahwa variabel tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa peraturan dan perundang undangan mengakibatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan yang relatif sama setiap SKPD.

Pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi laporan keuangan

Pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi laporan keuangan dapat dijelaskan dalam bentuk pernyataan hipotesis kedua (H_2), sebagai berikut:

H_2 : komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

Dengan demikian nilai t_{hitung} (2,409) > t_{tabel} (1,995) t_{hitung} dengan nilai signifikansi t sebesar (0,019) < (0,05), hal ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan dan H_2 diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012) yang menyatakan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi. Salah satu bentuk komitmen yang dijalankan organisasi adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui media massa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap transparansi laporan keuangan

Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap transparansi laporan keuangan dijelaskan dalam bentuk pernyataan hipotesis ketiga (H_3), sebagai berikut:

H_3 : sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

Dengan demikian nilai t_{hitung} (2,210) > t_{tabel} (1,995) t_{hitung} dengan nilai signifikansi t sebesar (0,031) < (0,05), hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal

pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dan H₃ diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Diana (2012) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap transparansi laporan keuangan. Sistem pengendalian internal pemerintah yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dapat memberikan keyakinan memadai agar tercapainya tujuan organisasi.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Analisis koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai R, yaitu dari nol sampai dengan satu.

Tabel 2
Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.601 ^a	.362	.333	2.151	2.088

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dari table 2 nilai R menggambarkan hubungan ganda antara variabel independen (tekanan eksternal, komitmen manajemen dan sistem pengendalian internal pemerintah) dengan variabel dependen (transparansi laporan keuangan) yakni diketahui nilai R sebesar 0,601. Artinya adalah bahwa korelasi ganda antara variabel

independen dengan variabel dependen memiliki hubungan yang kuat.

Diketahui nilai *Adjusted R²* Square sebesar 0,333. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 33,3 %, sedangkan sisanya sebesar 66,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan terhadap 81 responden yang merupakan para pimpinan atau pegawai SKPD yang bekerja di Kota Bukittinggi.
2. Penelitian ini menyebarkan kuesioner sebanyak 81 buah dan yang kembali sebanyak 88% atau sejumlah 71 kuesioner.
3. Secara umum hasil pengujian validitas dan reliabilitas telah memberikan hasil yang baik dan patut dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Begitu juga dengan semua asumsi klasik yang diperoleh telah menunjukkan bahwa normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian ini terdistribusi normal, semua model terbebas

dari multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

4. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel tekanan eksternal, komitmen manajemen dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.
5. Nilai *Adjusted R Square* didalam penelitian ini adalah sebesar 0,333. Artinya bahwa variabel transparansi laporan keuangan (dependen) dijelaskan oleh variabel tekanan eksternal, komitmen manajemen dan sistem pengendalian internal pemerintah (independen) sebesar 33,3 %, sedangkan sisanya sebesar 66,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran untuk para peneliti berikutnya yang ingin mengadakan atau melanjutkan penelitian ini. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempengaruhi implikasi berbagai bidang, dibawah ini dibahas kontribusi dan implikasi tersebut, yaitu :

1. Bagi ilmu pengetahuan
Dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian berikutnya. Para

peneliti berikutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini, dan juga hasil penelitian-penelitian lainnya, sebagai dasar replikasi untuk penelitian berikutnya. Para peneliti berikutnya dapat juga meneliti mengenai hubungan tekanan eksternal, komitmen manajemen dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan juga menggunakan variabel-variabel lainnya yang mungkin mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan.

2. Bagi pihak Pemerintah
Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah atau regulator khususnya mengenai transparansi pelaporan keuangan dan penerapannya serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah untuk kedepannya. Diharapkan dengan adanya penerapan transparansi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah sehingga akan tercipta pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Bagi SKPD
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan responden pada khususnya mengenai hubungan tekanan eksternal, komitmen manajemen dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan khususnya yang diterapkan di sektor pemerintahan yang ada di Kota Bukittinggi. Dengan adanya tiga hipotesis yang

berpengaruh, maka diharapkan bagi pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat mempertahankan transparansi SKPD dengan selalu menjalankan segala kegiatan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga komitmen manajemen serta sistem pengendalian internal pemerintah agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Komitmen manajemen yang tinggi dan sistem pengendalian internal pemerintah dapat memutuskan rantai kolusi yang terjadi didalam badan pemerintahan serta dapat berfungsi untuk terciptanya transparansi laporan keuangan .

4. Bagi masyarakat
Peran masyarakat sangat perlu ditingkatkan untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan yang transparan maka diperlukan juga partisipasi masyarakat didalamnya terkait dengan anggaran dan pengelolaannya. Karena anggaran merupakan uang dan hak rakyat selaku pengguna layanan publik dimana masyarakat berhak untuk mengetahui sumber dan untuk apa saja uang tersebut digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmidawati, 2013. *Pengaruh Tekanan Eksternal dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. Universitas Riau
- Fauzi, Eko, 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Internal terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. Universitas Riau.
- Frumkin, P. dan J. Galaskiewicz. 2004. Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Partial Least Square*, Edisi kedua, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hess, D. 2007. Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency. *Business Ethics Quarterly*.
- Johannes, Sihaloho. 2013. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. Jurnal Universitas Riau
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat.

- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 2 No. 1
- Mulyadi, Budi 2006, *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Vol. 2 No. 1, Mei
- Nela, Dwi Dan Etika. 2013. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah*. Jurnal Penelitian Terdahulu Universitas Bung Hatta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Ridha, M. Arsyandi dan Hardi Basuki, 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 2012.
- Suwardjono.2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Sari, Diana. 2010. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan*. Jurnal Penelitian Terdahulu Universitas Padjajaran, Bandung (Studi Empiris Pada SKPD Kota Cimahi)
- Sedamaryanti. 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Mandar Maju, Bandung
- Silvia. 2013 *Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Mabajemen, Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh). Skripsi
- Scott, W.R.1987. *The Adolsence of Institutional Theory*. *Administrative Science Quarterly*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Otonomi Daerah*